



Perajin Tas Tanggulangin Beradaptasi dengan Pasar Daring



Tas-tas yang selesai diproduksi di UD Sumber Redjeki di Sentra Industri Tas Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024). Perajin di sentra industri tas tersebut kini terus beradaptasi untuk memenuhi permintaan pasar daring. Dengan jumlah pegawai mencapai 80 orang, UD Sumber Redjeki mampu memproduksi tas hingga 3.000 buah per hari.

Investasi Makin Minim Ciptakan Lapangan Kerja

Realisasi investasi langsung di Indonesia pada 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3 persen dari target. Namun, elastisitasnya terhadap penciptaan lapangan kerja merosot.

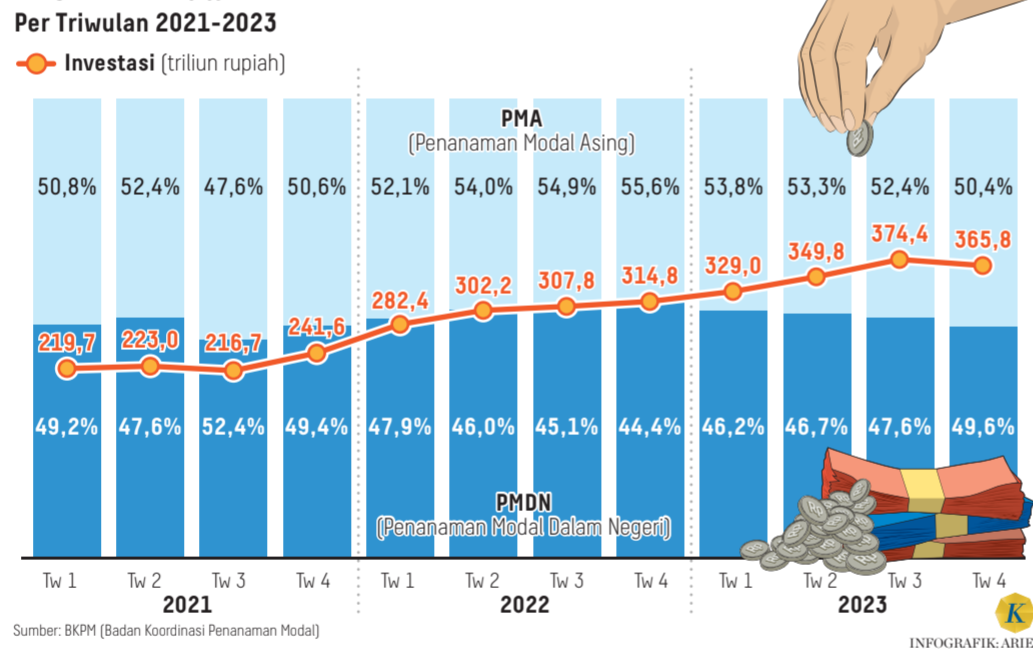
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah gejala tahun politik yang memanas, porsi investasi asing pada 2023 merosot. Catatan pentingnya, penyerapan tenaga kerjanya juga anjlok. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan, investasi asing tidak tumbuh sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang membuat pertumbuhan investasi asing terhambat.

Pertama, acuan dasar target investasi dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Pada 2021, misalnya, basis target investasi adalah Rp 900 triliun. Target itu meningkat menjadi Rp 1.200 triliun pada 2022 dan Rp 1.400 triliun pada 2023.

Kedua, faktor tahun politik yang membuat ketidakpastian meningkat. Hal itu membuat investor asing ragu-ragu menanamkan modal di Indonesia. "Jujur saja, saya tidak bisa tutupi, memang ada sebagian investor itu *wait and see*. Namun, di atas itu sebenarnya masih ada kepercayaan (investor). Makanya, itu jadi tantangan bagi kami untuk tetap meyakinkan investor bahwa sekalipun di tahun politik seperti ini, kita tetap *clear*," ujarnya.

Di sisi lain, meski realisasi investasi berhasil melampaui target, penyerapan tenaga kerja masih minim. Sepanjang 2023, realisasi investasi ribuan triliun hanya menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Sekalipun naik dari tahun sebelumnya yang se-

Tren PMA dan PMDN Per Triwulan 2021-2023



banyak 1,36 juta lapangan kerja, jumlah itu masih terhitung minim dibandingkan dengan nilai investasi besar yang masuk dalam beberapa tahun terakhir. Bahlil mengakui, penyerapan tenaga kerja memang belum berbanding lurus dengan realisasi investasi. Namun, pemerintah tidak saja fokus menarik investasi padat modal, tetapi juga berbasis teknologi demi mengerek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih masif. "Kalau kita hanya berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun negara ini tidak akan maju karena padat karya itu, mohon maaf, gajinya terukur. Kalau kita hanya ciptakan lapangan kerja dengan gaji Rp 4

juta-Rp 5 juta terus, bagaimana kita mau naik kelas," katanya. Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi langsung di Indonesia sepanjang 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3 persen dari target yang ditetapkan Presiden dan 129 persen dari target rencana strategis (renstra) pemerintah.

Naik-turun

Dari total realisasi investasi itu, investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) tercatat Rp 674,9 triliun atau tumbuh 22,1 persen secara tahunan. Sementara, meski nominalnya lebih besar, investasi asing (penanaman modal asing/PMA) hanya tumbuh 13,7 persen.

Data BKPM juga menunjukkan, komposisi PMDN terus meningkat dari triwulan I sampai triwulan IV. Sebaliknya, porsi investasi PMA terus menurun. Porsi PMDN berturut-turut adalah 46,2 persen per triwulan I, 46,7 persen pada triwulan II, 47,6 persen pada triwulan III, dan 49,6 persen pada triwulan IV.

Sebaliknya, porsi PMA terus merosot dari awalnya 53,8 persen pada triwulan I menjadi 53,3 persen per triwulan II, 52,4 persen per triwulan III, dan 50,4 persen per triwulan IV.

Pada tahun-tahun sebelumnya, porsi PMA biasanya stabil, bahkan meningkat dari triwulan ke triwulan. Pada 2022, misalnya, porsi investasi PMA pa-

da triwulan IV adalah 55,6 persen, naik dari triwulan III (54,8 persen), triwulan II (54 persen), dan triwulan I (52,1 persen).

Peneliti Center of Investment Trade and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menilai, naiknya porsi investasi PMDN di satu sisi adalah hal baik karena menunjukkan minat dan kapasitas pengusaha dalam negeri untuk menanamkan modal di negeri sendiri. Di sisi lain, itu menunjukkan kalau investor asing masih *wait and see* akibat kondisi politik domestik yang panas dan gaduh.

Namun, ia mengingatkan, hal yang lebih penting dari pencapaian target kuantitas adalah kualitas investasi. Sejauh ini, meski dengan nilai investasi besar, dampak lapangan kerja di dalam negeri masih minim. Angka hilirisasi masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pun tetap berjalan di tempat.

Oleh karena itu, pemerintah tak bisa mengabaikan investasi padat karya. Meski nilai investasinya tidak sebesar yang berbasis teknologi, investasi padat karya sangat penting untuk menjawab tantangan bonus demografi dan menyerap mayoritas masyarakat yang belum bisa terserap di investasi padat modal dan teknologi.

"Harus berjalan beriringan. Kalau kita lupa pada investasi padat karya, kita justru bisa terancam bonus demografi dan kita mengorbankan kualitas demi target realisasi bisa tercapai. Pertanyaannya, dampak investasi yang besar lari ke mana," katanya. (AGE)

KESEJAHTERAAN

Pekerja Rentan Belum Masuk Kriteria Bansos

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena pekerja prekariat yang rentan miskin terus menguat. Kelompok ini belum semuanya masuk dalam kriteria layak menerima bantuan sosial.

Pekerja prekariat adalah pekerja yang tidak menentu jam kerja, kontrak, dan lingkup kerjanya. Contohnya, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga migran, pekerja mitra platform digital, dan pekerja sektor perawatan. Mereka tergolong tidak layak sebagai penerima bantuan sosial untuk pekerja seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejak pandemi Covid-19, pekerja prekariat semakin banyak. "Salah satu problem bantuan sosial (bansos) untuk pekerja adalah persyaratan penerima sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata," ujar Wahyu saat menghadiri peluncuran buku *Dilema Bansos*, Rabu (24/1/2024), di Jakarta.

Berdasarkan riset Migrant Care di tujuh kabupaten, selama pandemi Covid-19, tingkat penerimaan bansos subsidi listrik di kalangan pekerja migran Indonesia mencapai 78 persen. Adapun berdasarkan survei Migrant Care tahun 2022, program Kartu Prakerja hanya bisa diakses oleh pekerja di daerah urban. Pelatihan keterampilan yang diberikan program itu memakai saluran internet sehingga hanya pekerja yang tinggal di perkotaan dengan akses internet lancar yang bisa mengikuti pelatihan.

"Indonesia mempunyai sejarah panjang penyaluran bansos yang lebih banyak untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, desain program bansos belum inklusif kepada kelompok pekerja, terutama pekerja prekariat yang rentan miskin," kata Wahyu.

Peneliti Pusat Penelitian Populasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, menemukan, sebanyak 23 program bansos yang dia teliti cenderung hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan belum semuanya menyentuh individu kelas pekerja, seperti pekerja rentan.

Indonesia juga akan menuju negara dengan populasi penduduk tua. Pada tahun 2030, dia memperkirakan semakin banyak orang lanjut usia (lansia) yang memutuskan tetap bekerja. Hal itu sejalan dengan sejumlah riset mengenai generasi *sandwich* yang kini marak. Generasi ini harus menanggung biaya hidup orangtua, selain dirinya dan anaknya. Mereka diperkirakan masih akan bekerja saat lansia agar tidak membebani anaknya.

Kami merasa, pemerintah perlu menyusun data itu terlebih dulu supaya skema bansos bagi pekerja rentan lebih tepat sasaran bisa disusun.

Yanu Endar Prasetyo

Namun, program bansos yang didesain khusus untuk kelompok itu belum dirancang. Kalaupun ada bansos bertema ketenagakerjaan, seperti BSU dan Kartu Prakerja, Yanu sependapat dengan Wahyu bahwa program itu belum ideal.

Program Kartu Prakerja sebenarnya lebih ideal jika peruntukkannya fokus pada pekerja rentan dengan model pelatihan luring. Jika pelatihan keterampilan dilakukan secara daring, Yanu menilai itu hanya menguntungkan vendor.

"Indonesia juga belum mempunyai data pasti mengenai kerentanan pekerja. Kami merasa, pemerintah perlu menyusun data itu terlebih dulu supaya skema bansos bagi pekerja rentan lebih tepat sasaran bisa disusun," ujar Yanu.

Relatif

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari berpendapat, definisi kemiskinan yang dipakai pemerintah dalam skema bansos adalah definisi yang relatif. Adapun alokasi dananya disesuaikan dengan pagu indikatif kementerian/lembaga. Akibatnya, penyaluran berbasis kuota itu susah tepat sasaran.

"Program bansos juga biasanya berbasis keluarga. Definisi 'keluarga' yang dipakai pemerintah adalah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua anak. Definisi seperti ini semakin tidak pas bagi kelas pekerja," ujarnya. Dian mencontohkan, di kalangan sejumlah pekerja migran terdapat pekerja migran perempuan yang ditinggal pergi suaminya sehingga dia hanya tinggal bersama anak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, secara terpisah, mengatakan, hingga sekarang, Kemnaker belum menerima arahan kebijakan BSU. Dengan demikian, Kemnaker belum bisa mengumumkan apakah BSU akan dilanjutkan atau tidak. Kebijakan BSU berjalan pada 2021 dan 2022 dengan tujuan awal untuk membantu pekerja yang upahnya berkurang karena pandemi Covid-19. (MED)

KPR 35 Tahun



Buruh bangunan beristirahat setelah sehabian mengerjakan pembangunan perumahan baru di kawasan Curug, Depok, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Skema kredit kepemilikan rumah dengan tenor hingga 35 tahun dinilai menjadi solusi pembiayaan untuk menjangkau rumah yang semakin mahal. Pasar rumah kini didominasi oleh generasi Z.

INVESTASI KEUANGAN

Pemilu Beri Dampak Jangka Pendek, The Fed Lebih Jadi Acuan

JAKARTA, KOMPAS — Sentimen Pemilu 2024 tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan investor asing di instrumen investasi berjangka dalam jangka panjang. Sebab, keputusan berinvestasi oleh para investor cenderung dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Hal ini mengemuka dalam acara "Smart Talk: Shifting Currents" yang diselenggarakan oleh DBS Treasures Private Client di Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menjadi salah satu pembicara, DBS Chief Investment Officer (CIO) Hou Wey Fook, mengatakan, hasil dari Pemilu 2024 memberikan sedikit kekhawatiran bagi para investor. Namun, secara historis,

dampak pemilu hanya dirasakan dalam jangka pendek dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian hingga periode satu tahun.

"Bagi investor, yang terpenting pemilu dapat berlangsung secara kondusif. Di sisi lain, para kandidat juga bisa dibilibang sudah cukup dikenal oleh para investor atau bukan orang yang sama sekali baru. Siapa pun yang menang dampaknya relatif tidak signifikan," katanya.

Para investor, Fook mengatakan, akan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh pemimpin selanjutnya. Terkait kondisi perekonomian domestik ke depan, para investor asing masih tertarik terhadap Indonesia.

Berdasarkan data setelman sejak awal 2024 hingga 18 Januari, modal asing mengalir masuk ke Indonesia senilai Rp 29,22 triliun. Ini terdiri dari beli neto investor asing sebesar Rp 5,72 triliun di pasar surat berharga negara (SBN), beli neto investor asing di pasar saham sebesar Rp 9,83 triliun, serta beli neto investor asing di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebesar Rp 13,67 triliun.

Pembicara lainnya, Equities Specialist DBS Group Research, Maynard Arif, menambahkan, investor asing cenderung lebih mempertimbangkan arah kebijakan suku bunga acuan The Fed ketimbang kontestasi politik yang saat ini masih berlangsung. Mereka biasanya cenderung benar-benar *wait and see*

begitu mendekati masa pencoblosan atau menjelang 14 Februari 2024 untuk melihat hasilnya.

"Dampak pemilu terhadap pasar saham atau investasi *bond* tidak terlalu besar dan hanya dalam jangka pendek. Berbeda dengan investasi langsung, di luar saham atau *bond*, ada pandangan berbeda. Dampak investasi dalam tiga pemilu terakhir biasanya investor yang akan menanamkan modalnya ke sektor riil, seperti pabrik manufaktur cenderung agak *slowdown*, karena mereka bergantung pada kebijakan dari pemimpin baru," katanya.

Pada forum berbeda, Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Aries Setiadi menyampaikan, Pemilu 2024

dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. "Kita berusaha melihat pemilu ini secara optimistis karena akan berkontribusi positif," ujarnya dalam acara "Inklusi Keuangan Dorong Kemajuan Ekonomi 2024" yang digelar OY! Indonesia bersama Aftech, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BR) di Jakarta.

Secara umum, industri *fintech* dalam negeri memiliki pandangan optimistis terhadap prospek perekonomian domestik. Ini didukung tiga faktor, di antaranya kembalinya pertumbuhan ekonomi nasional di sekitar 5 persen dan besarnya potensi pengembangan inklusi keuangan di Indonesia. (AGP)